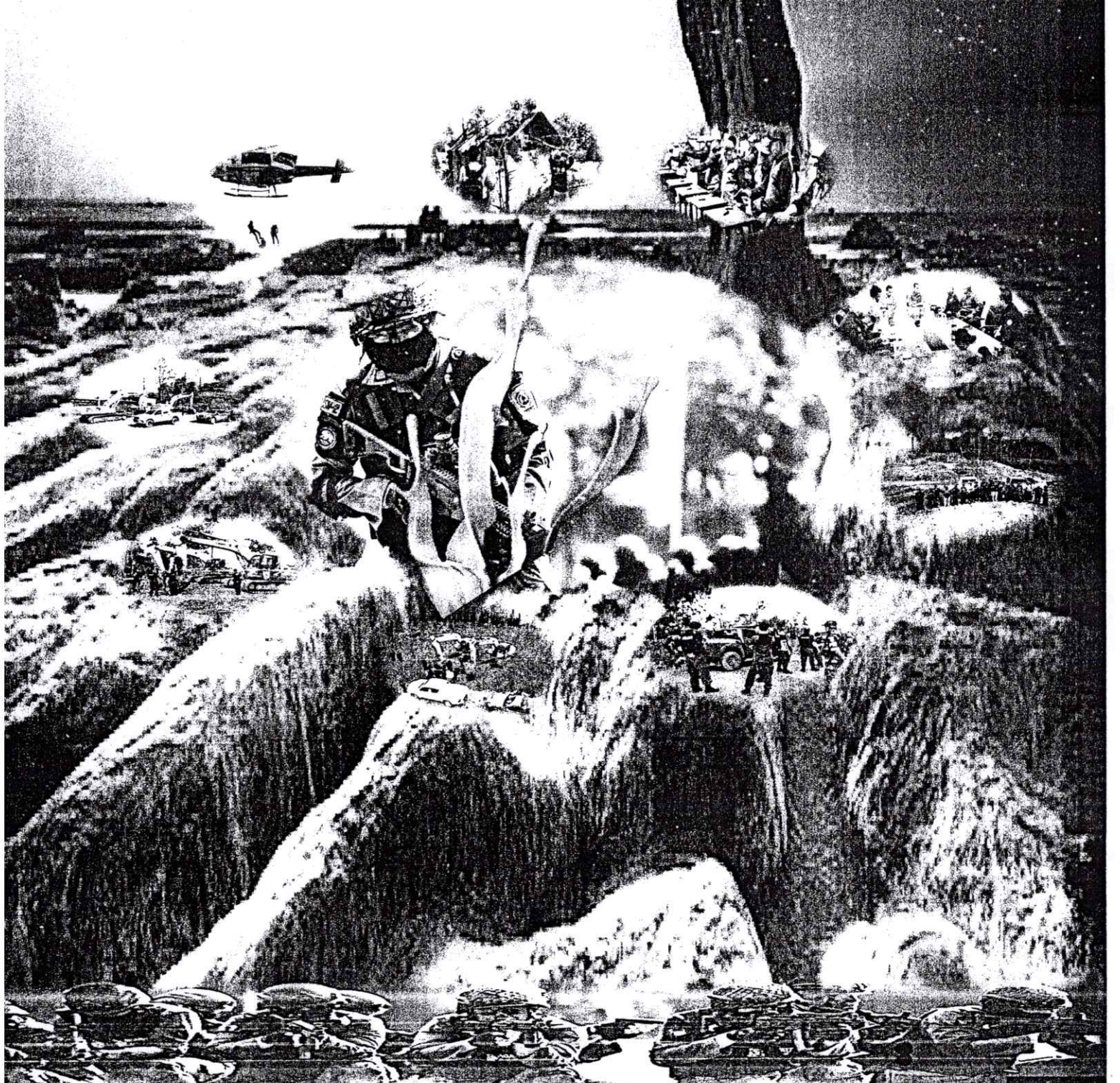




RENCANA KERJA

2020

SIKAP DAN PENGAMANAN HUTAN
SERTA PENEGAKAN HUKUM
MELALUI HUKUM HIDUP DAN KEHUTANAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pencegahan dan pengamanan Hutan tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan berbagai tugas yang di emban dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 s.d 2024 serta Rencana Strategi Direktorat pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil optimal sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kinerja Direktorat Pencegahan dan Pengaman Hutan.

Jakarta, Januari 2020



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

NIP. 19620621 199002 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH) Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan keempat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP Tahun 2020. Penyusunan Renja Direktorat PPH Tahun 2020 mengacu kepada Renja Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) dan dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Awal RKP yang di dalamnya mencakup Proyek Prioritas Nasional lingkup GAKKUM KLHK. Proyek Prioritas Nasional lingkup GAKKUM KLHK merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja Direktorat PPH memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Direktorat PPH, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Rencana Kerja Direktorat PPH ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat PPH terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi Direktorat PPH yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2018, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

B. Kondisi Umum

Hutan Indonesia merupakan contoh hutan tropis yang paling lengkap, beragam, dan bernilai di dunia. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai habitat untuk berbagai flora dan fauna, namun juga memainkan peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kehidupan masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan dan pelayanan jasa lingkungan. Namun hutan Indonesia telah dieksploitasi tanpa mempertahankan aspek pelestariannya. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2016, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar ±187.751,9 Juta ha, dengan hasil sebagai berikut Areal berhutan: 95.271,9 juta ha (50,74%) dan Areal tidak berhutan: 92.480,0 juta ha (49,26%)

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang membagi dan menetapkan kawasan berdasarkan peruntukannya, serta pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun telah dilakukan perlindungan dan penetapan kawasan berdasarkan peruntukan serta penetapan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar sebagai jenis yang dilindungi, akan tetapi ternyata pemanfaatan sumber daya alam masih banyak dilakukan dengan cara-cara illegal.



Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan masih terjadi dari tahun ke tahun. Intensitas gangguan keamanan hutan baik yang berada di hutan konservasi, hutan produksi, maupun hutan lindung menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Illegal logging, perambahan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural, pembakaran hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal, penambangan tanpa ijin (seperti peti, timah hitam, dan sebagainya) merupakan gangguan yang banyak terjadi hampir di seluruh kawasan hutan Indonesia dan sangat mengancam keutuhan kawasan hutan.

Gangguan terhadap keutuhan kawasan hutan dilatarbelakangi kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun tingkat kesadaran tentang konservasi dari masyarakat yang masih rendah. Salah satu gangguan keamanan hutan yang membawa dampak signifikan yaitu adanya perambahan kawasan hutan. Selain membawa dampak terhadap kerusakan ekosistem dan menurunnya keanekaragaman hayati, perambahan hutan berdampak terhadap pengakuan kepemilikan kawasan hutan oleh para perambah. Dari kegiatan perambahan akan muncul rangkaian aktifitas gangguan hutan yang lain seperti illegal logging, pembakaran hutan dan perburuan satwa liar.

Lingkup kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah selain kondisi institutive juga kondisi substantif. Adapun kondisi *institutive* secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi, dan organisasi. Sedangkan kondisi substantive meliputi substansi yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi Direktorat PPH, seperti misalnya kondisi lingkungan hidup dan hutan serta kondisi kesehatan ekologis dan kondisi keberfungsian ekosistem yang dapat berubah oleh keberhasilan upaya penegakan hukum, yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberhasilan termasuk di atas merupakan dampak dan/atau manfaat dari keluaran dari kegiatan penegakan hukum yang secara garis besar meliputi:

1. Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
4. Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
5. Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;

C. Kondisi Khusus

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (*Multidoors*), dan penerapan kebijakan simbolik.



D. Struktur Organisasi dan SDM

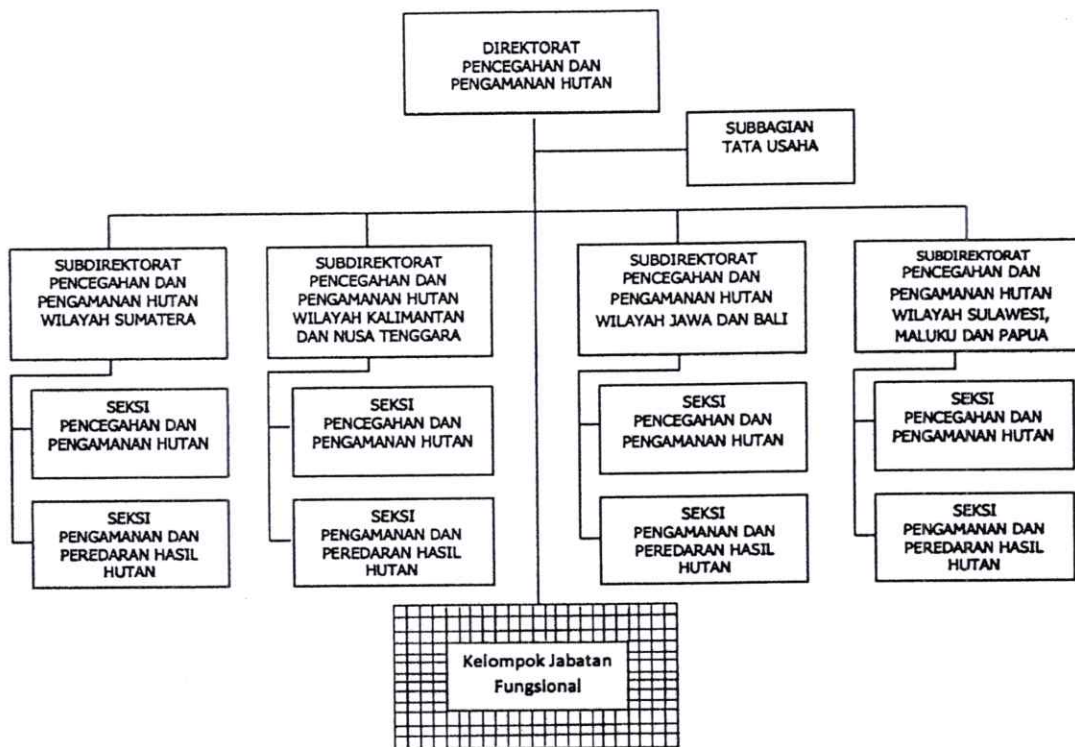
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sumatera
2. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Jawa dan Bali yang membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa dan Bali
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Jawa dan Bali
3. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara
4. Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
 - b. Seksi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua
5. Sub Bagian Tata Usaha, yang secara administratif dan fungsional dibawah binaan Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Wilayah Sumatera

Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Pada Pasal 1162 di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pencegahan dan pengamanan hutan.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Adapun pada Pasal 1163 dijabarkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
5. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervise pelaksanaan urusan pencegahan tindak pidana kehutanan serta penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber daya yang dialokasi pada Ditjen PHLHK masih sangat terbatas, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan dan sarana.

Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pencegahan dan pengamanan hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini memiliki Jumlah Pegawai pada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan sebanyak 44 orang dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 34 orang dan perempuan 10 orang. Komposisi jabatan: Eselon 2 (1 orang), Eselon 3 (4 orang), Eselon 4 (9 orang) dan ada 9 orang pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
2. Pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengamanan hutan, didukung Polhut sebanyak 3.175 orang di pusat dan 5.113 orang di daerah, termasuk Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) sebanyak 796 orang, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 1.025 orang yang tersebar pada seluruh UPT dan Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. Apabila dibandingkan dengan luas kawasan hutan maka kondisi saat ini rata-rata 1 (satu) orang Polhut harus mengamankan kawasan hutan seluas ± 15.545 ha.

Mengingat kondisi tersebut di atas, maka untuk mengurangi tingkat kerusakan terhadap keutuhan kawasan hutan maka upaya pencegahan dan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak pidana kehutanan dan pengamanan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku.



BAB II.
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPH pada Tahun 2019 seperti terlihat dalam tabel berikut:

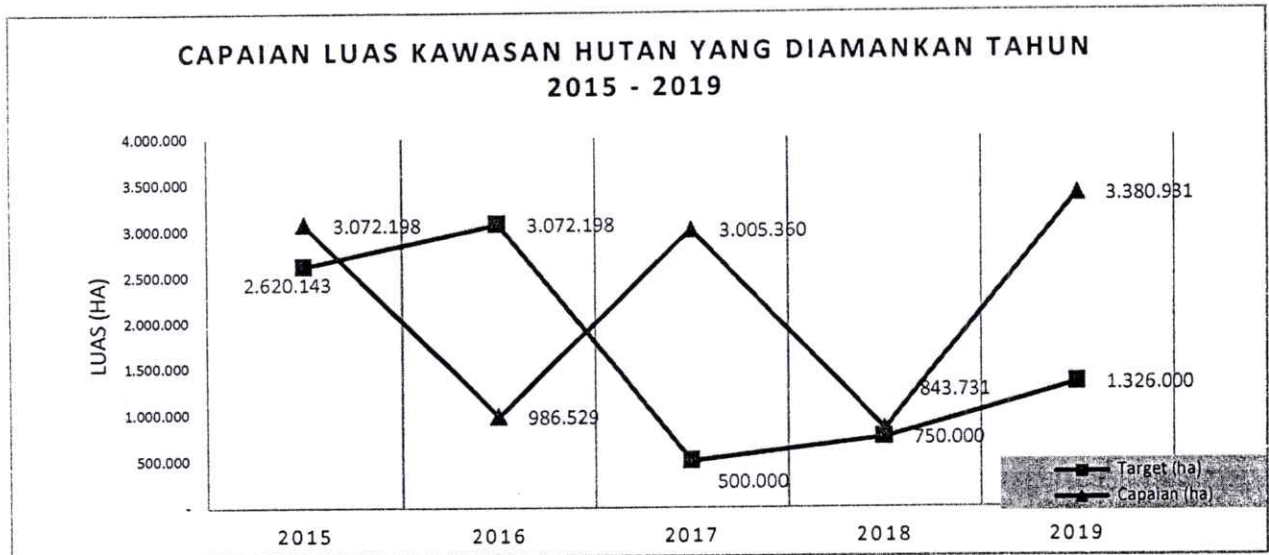
Tabel 1 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.326.000 Ha	3.373.974,50 Ha	100
		Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	5.000 Ha	58.034,83 Ha	100
		Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100



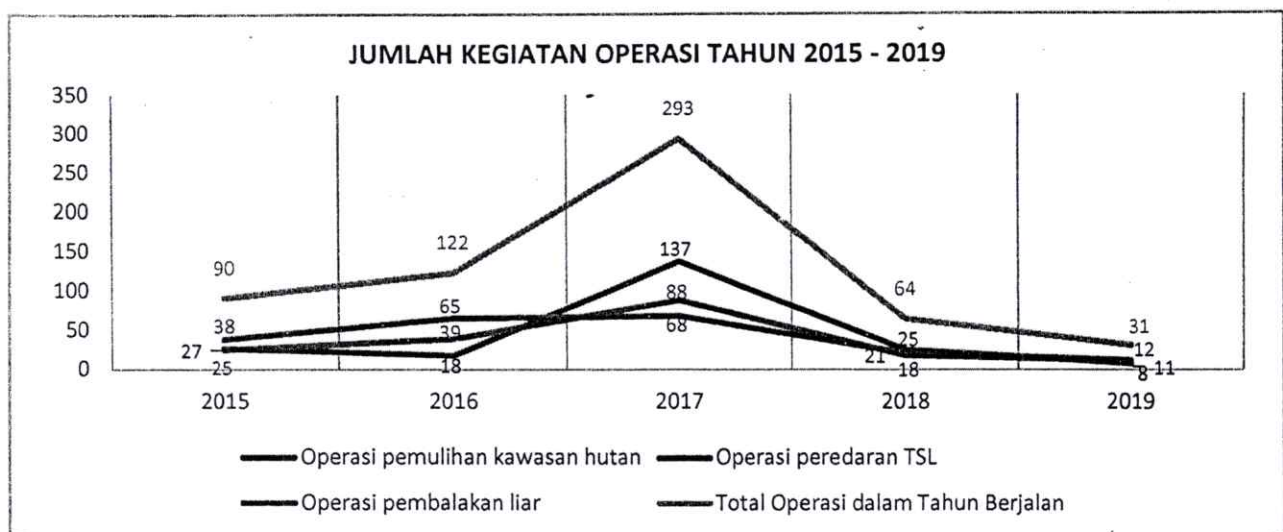
Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli, dan Operasi

IKK 1 telah tercapai dengan persentase capaian 100% dengan capaian kawasan hutan yang telah diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan seluas 3.380.930,50 Ha, lebih tinggi dari target seluas 1.326.000 Ha.



Gambar 1 Capaian luas kawasan hutan yang berhasil diamankan tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2019, secara keseluruhan Direktorat PPH telah melaksanakan kegiatan operasi sebanyak 31 kali mencakup operasi pemulihan keamanan kawasan hutan sebanyak 8 kali, operasi pembalakan liar 11 kali dan operasi peredaran TSL sebanyak 12 kali.



Gambar 2 Rekapitulasi jumlah kegiatan Operasi tahun 2015 – 2019



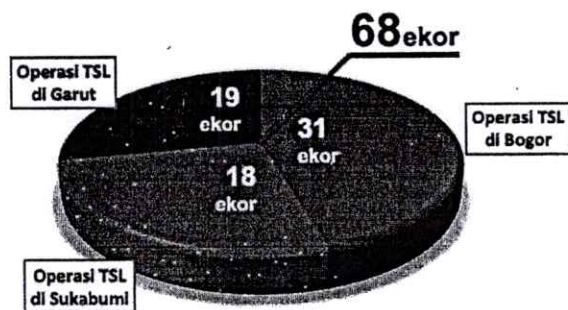
Tabel 2 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

No.	Kegiatan Operasi	Jumlah Operasi	Hasil yang Diamankan
1	Kejahatan TSL	12	99 ekor satwa liar dan 1.269 buah bagian tubuh satwa liar
2	Pembalakan Liar	11	9.086,20 m3 kayu
3	Pemulihan keamanan kawasan hutan	8	3.380.930,5 Ha

Luas DAS Citarum yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan Melalui Kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi

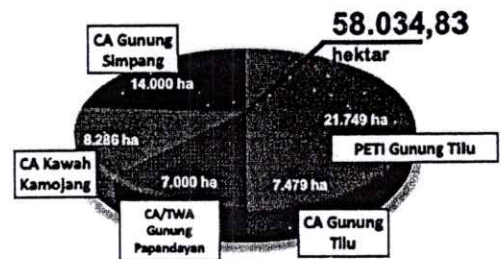
Direktorat PPH bersama Satgas Citarum telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Operasi pemulihan keamanan kawasan hutan di Hulu DAS Citarum dengan capaian luas kawasan yang diamankan 58.034,83 Ha.

Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum

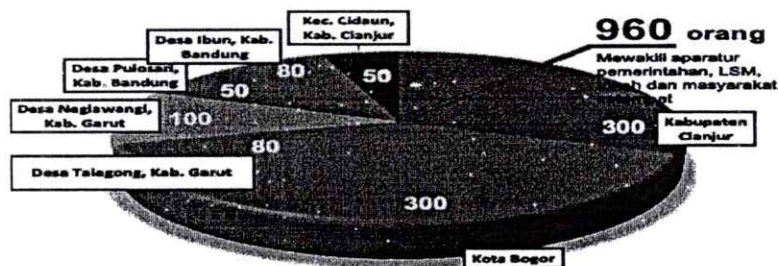


1. Operasi TSL di Bogor (18-19 Oktober 2019)
2. Operasi TSL di Sukabumi (3-6 Desember 2019)
3. Operasi TSL di Garut (10-14 Desember 2019)

Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan dalam rangka Penyelamatan DAS Citarum



1. Operasi PETI di CA Gunung Tilu (27-28 Agustus 2019)
2. Operasi di CA Gunung Tilu (18-21 November 2019)
3. Operasi di CA Gunung Papandayan (18-21 November 2019)
4. Operasi di CA Kawah Kamojang (25-28 November 2019)
5. Operasi di CA Gunung Simpang (25-28 November 2019)



1. Kabupaten Cianjur (Februari 2019)
2. Kota Bogor (Februari 2019)
3. Desa Talegong, Kab. Garut (Agustus 2019)
4. Desa Naglawangi, Kab. Garut (November 2019)
5. Desa Pulosari, Kab. Bandung (November 2019)
6. Desa Igun, Kab. Bandung (November 2019)
7. Kecamatan Cidaun, Kab. Cianjur (November 2019)

Gambar 3 Hasil kegiatan sosialisasi dan operasi penyelamatan DAS Citarum



Sarana Prasarana Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Memenuhi Standar Minimum

Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2019 telah dilakukan pada 1 lokasi sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu pada kantor Direktorat PPH sehingga realisasasi kinerja mencapai 100%. Pengadaan meliputi perlengkapan pengamanan hutan, peralatan intelijen, dan pengadaan seragam Polhut dan SPORC dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2 Daftar pengadaan barang dan jasa

No.	Uraian	Jumlah
A	Pengadaan Bangunan, Peralatan dan Mesin	
1	Server Opsroom	1 set
2	Laptop	2 unit
3	Printer warna	4 unit
4	AC portable	1 unit
5	Dispenser	2 unit
6	Coffee maker	1 unit
7	Printer	5 unit
8	Kursi kantor	1 unit
9	LCD portable mini	3 unit
10	Air Cooler	1 unit
11	Microwave	1 unit
B	Pengadaan Bahan Seragam Polhut dan SPORC	
1	Bahan kain seragam PDL Polhut	5.300 meter
2	Bahan kain seragam PDL SPORC	1.400 meter
C	Pengadaan Seragam Lapangan Direktorat PPH	
1	Baju seragam	50 unit
2	Sepatu	50 unit
3	Celana	50 unit

Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja

Layanan dukungan manajemen satuan kerja telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan dengan realisasi kinerja sebesar 100%, mencakup kegiatan:

1. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran

Kegiatan mencakup penyusunan RKAKL Direktorat PPH tahun 2020, evaluasi anggaran dan penatausahaan BMN Direktorat PPH.

2. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Kegiatan mencakup pengelolaan Satuan Pengawas Intern Pemerintahan, penyusunan Laporan Tahunan/Lakip Direktorat PPH, Penyusunan Analisa Beban Kerja dan pemutakhiran data pegawai Direktorat PPH.

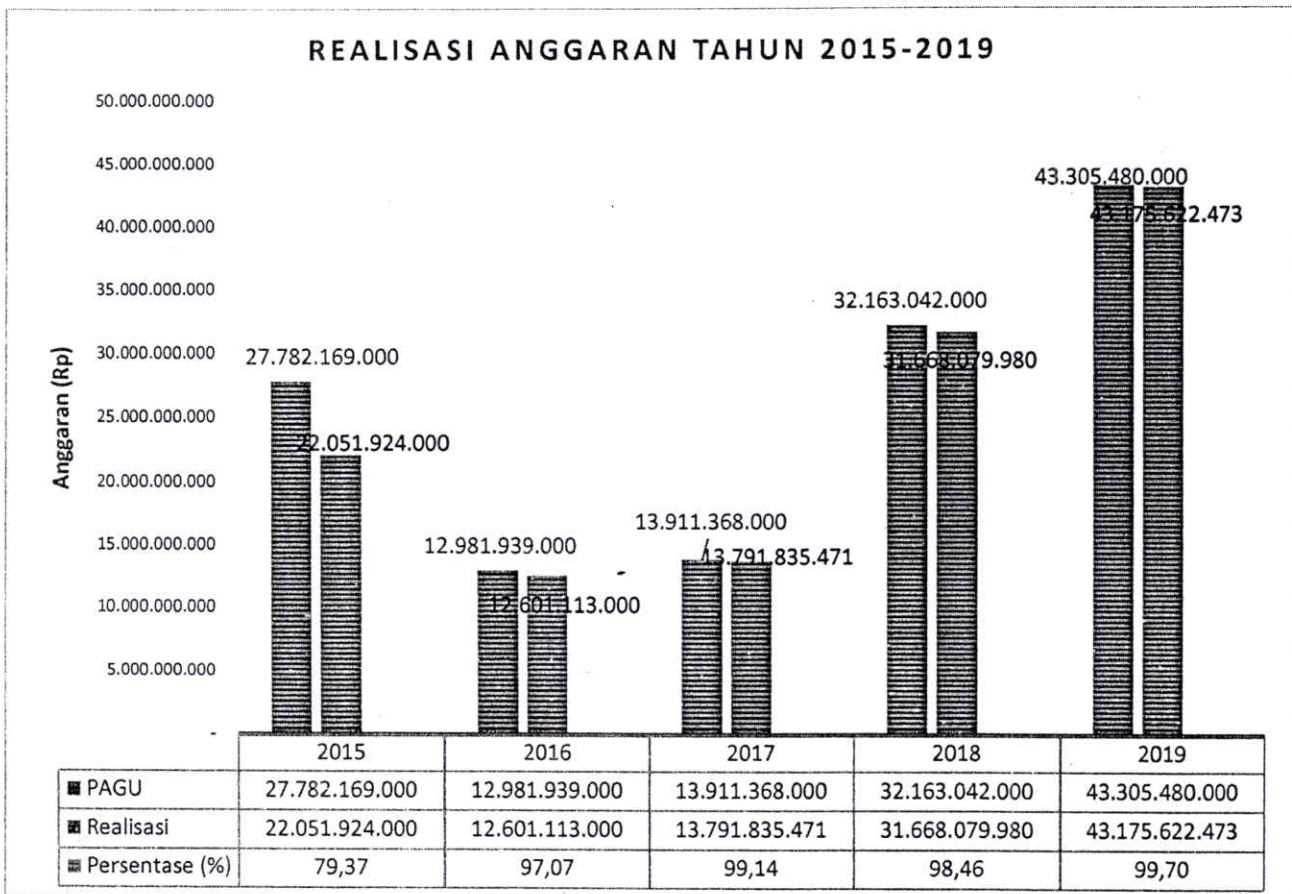


Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran telah dilaksanakan selama 12 bulan sesuai dengan target sehingga realisasi kinerja sebesar 100%. Pelaksanaan layanan perkantoran berupa kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, biaya operasional pimpinan dan pembayaran terkait operasional kantor.

Realisasi Anggaran Tahun 2019

Realisasi anggaran Direktorat PPH pada tahun 2019 secara keseluruhan sebesar Rp.43.175.622.473,- (Empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Apabila dibandingkan dengan target anggaran yaitu sebesar Rp. 43.305.480.000,- (Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), terlihat bahwa penyerapan anggaran mencapai 99,70%. Persentase serapan anggaran pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi pada lima tahun terakhir.



Gambar 4 Grafik perbandingan realisasi anggaran Dit. PPH tahun 2015 – 2019



Perhitungan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Pada tahun 2019, anggaran per IKK telah terealisasi dengan persentase serapan 99,70%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berlangsung dengan baik dan telah menggunakan sumber daya secara optimal. Besarnya realisasi anggaran per IKK tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Realisasi pencapaian kinerja Direktorat PPH Tahun 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	28.701.163.000	28.648.302.168	99.82
		Luas DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	2.381.160.000	2.367.208.142	99.41
		Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	9.867.677.000	9.867.339.644	100.00
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	Layanan dukungan manajemen satker	375.000.000	368.371.800	98.23
		Layanan perkantoran	1.980.480.000	1.924.400.719	97.17
Total			43.305.480.000	43.175.622.473	99.70

Capaian Indikator Tujuan

Indikator tujuan telah tercapai melalui pencapaian atas breakdown per tahun dari milestone di dokumen Renstra. Capaian terhadap milestone tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4 Capaian indikator tujuan tahun 2019

No.	Milestones Tahun 2019	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.326.000 Ha	3.373.974,50 Ha	100
2	Sarana prasarana pencegahan dan pengamanan hutan memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100



BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional

Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan secara garis besar dilakukan melalui kegiatan yang bersifat:

1. Preemptif melalui kegiatan identifikasi permasalahan, sosialisasi, dan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan niat berbuat jahat.
2. Preventif merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya intelijen, patroli, penjagaan dan lain-lain.
3. Represif merupakan kegiatan yang sifatnya penindakan, yaitu operasi pemulihan keamanan kawasan hutan dan operasi pengamanan peredaran illegal hasil hutan dan TSL.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan penyusunan kebijakan serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan
2. Koordinasi dengan para pihak terkait
3. Penyusunan rencana pengamanan
4. Sosialisasi dan publikasi
5. Operasi pemulihan keamanan kawasan dan penertiban peredaran hasil hutan dan TSL
6. Penjagaan dan pengamanan pasca operasi
7. Monitoring dan evaluasi

Rencana Kerja Direktorat PPH pada tahun 2020 dibagi dalam kegiatan, yakni:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa layanan perkantoran dan layanan dukungan manajemen satker.
2. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman di bidang kehutanan, yang terdiri atas :
 - a. Luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi. Untuk memenuhi capaian ini, luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan diperoleh dari hasil kegiatan operasi pemulihan fungsi kawasan hutan, pengamanan peredaran TSL dan Hasil Hutan Lainnya serta mobilisasi tenaga Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dilakukan pula kegiatan pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan hutan, penyusunan NSPK dan peningkatan kesamaptaan Polhut.
 - b. Operasi peredaran hasil hutan illegal yang dilaksanakan secara simultan dengan pelaksanaan inteligen dengan pengumpulan bahan keterangan tentang tolok penggerak, pemodal atau tokoh intelektual dari gangguan dan ancaman terhadap hutan yang kemudian dilakukan operasi pengamanan peredaran hasil hutan illegal dapat berjalan efektif dan efisien tepat sasaran sesuai dengan personil serta dukungan dananya sehingga mendapatkan hasil yang optimal.



- c. Penyediaan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum. Kegiatan yang ditindaklanjuti antara lain berupa dukungan pengadaan seragam Polhut dan prasarana perkantoran. Peningkatan kapasitas yang ditingkatkan dalam rangka menambah ketrampilan Polhut yang tangkas, trengginas dan bertalenta sehingga dapat mengantisipasi dan relevan dengan perkembangan ancaman dan gangguan bidang kehutanan terhadap perilaku kejahatan perusakan hutan.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rencana Program Prioritas Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020, sebagai berikut;

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020
Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	3.000.000 Hektar

Rencana Aksi Program Non Prioritas Nasional yang merupakan output kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 yang tidak termasuk dalam prioritas nasional adalah sebagai berikut;

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2020
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Operasi peredaran Hasil Hutan Illegal	110 Operasi
	Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	210 Orang



PROGNOSIS CAPAIAN PROGRAM PER TRIWULAN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TAHUN 2020

Indikator Kinerja Program	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Target 2020	Satuan
	i	ii	III	IV		
Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	400.000	600.000	1.120.000	880.000	3.000.000	Hektar **

Keterangan:

* = Target pencapaian Non Akumulatif

** = Target pencapaian akumulatif (TWI+TW II= TW III+ TW IV)

Adapun target kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen. Penegakan Hukum LHK pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020
1	Terlaksananya Pencegahan Luas hutan yang diamankan 3.000.000 Hektar dan Pengamanan Terhadap dari gangguan dan ancaman Gangguan dan Ancaman bidang kehutanan melalui Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	1.276.000 Hektar
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18 Operasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan perkantoran Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Layanan

Kegiatan:

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Rp. 39.927.263.000,-
Rp. 2.855.480.000,-

Jumlah Total Rp. 42.922.743.000,-

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2020 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2019, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2020.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian tahun 2020.

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAGU ANGGARAN DITJEN GAKKUM KLHK TA 2020

Berdasarkan Surat Nomor S.704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020, dapat disampaikan Pagu Anggaran KLHK unit eselon I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 sebesar Rp 468.790.771.000 dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Dana	Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)			Jumlah total (dalam ribuan rupiah)
	Operasional		Non Operasional	
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		
Rupiah Murni	113.871.071	30.886.691	289.014.104	433.771.866
PNBP			35.018.905	35.018.905
BLU				
PLN				
HLN				
PDN				
SBSN				
Jumlah	113.871.071	30.886.691	324.033.009	468.790.771

Tabel 36. Matriks Pagu Anggaran Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020

Pagu Anggaran TA 2020 pada unit eselon I Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp. 468.790.771.000,00 dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja.

RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS GAKKUM KLHK TA 2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Target	Satuan
Sasaran Strategis 4		
Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing		
Indikator Kinerja Utama 3		
Penyelesaian Kasus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219	Kasus
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Sasaran Program 1		
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan perundang-undangan		
Indikator Kinerja Program 1		
Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Meningkat	50	Persen
Sasaran Program 2		
Teramankannya Hutan dari Gangguan dan Ancaman		
Indikator Kinerja Program 2		
Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.700.000	Hektar
Sasaran Program		
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
Indikator Kinerja Program 3		
Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219	Kasus

Tabel 37. Target Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program GAKKUM KLHK TA 2020

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT PRIORITAS	KETERANGAN		
	TARGET	SATUAN	ALOKASI
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			468.791,0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			173.020,0
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan	26.012,0
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	2.250,0
Layanan Perkantoran	1	Layanan	144.758,0
Pencegahan dan Pengamanan Hutan			136.905,0
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	3.000.000	Hektar	67.465,0
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	110	Operasi	69.440,0
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			22.461,0
Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui pengadilan dan di Luar Pengadilan	40	Kasus	19.770,0
Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	6	Kasus	2.691,0
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			62.830,0
Usaha dan/atau kegiatan yg dilawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	1.000	Perusahaan	52.830,0
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	910	Perusahaan	51.080,0
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	90	Perusahaan	1.750,0
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang	10.000,0
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			73.575,0
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	173	Kasus	56.986,0
PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	210	orang	16.589,0

Tabel 38. Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PHLHK Per Output, Per Kegiatan, Per Target Ta 2020

RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN DITJEN PENEGAKAN HUKUM LHK TAHUN 2020 PER SATUAN KERJA

NO	SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	SUMATERA	22.073.701	38.335.706	10.740.398	71.149.805
2	JABANUSRA	19.361.677	34.277.731	6.947.562	60.536.970
3	KALIMANTAN	17.791.470	36.480.290	7.636.000	61.857.760
4	SULAWESI	15.859.263	29.061.711	8.000.000	52.865.974
5	MALUKU PAPUA	12.250.728	20.237.656	7.308.270	39.716.654
6	KANTOR PUSAT	26.534.232	137.131.824	18.762.552	182.703.608
TOTAL		113.871.071	295.524.918	59.294.782	468.790.771

Tabel 39. Rincian Pagu Alokasi Anggaran Ditjen GAKKUM KLHK TA 2020 per Satker

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN TA 2020 ('000)

PROG/KEG/OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN/TARGET
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	39.927.263
Jumlah Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	1.276.000 Hektar
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	29.279.007
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	18 Operasi
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	10.648.256

Tabel 48. Matriks Anggaran dan Target Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

REKAPITULASI LOCUS PER OUTPUT PER KEGIATAN DI TOR SATKER 2020

OUTPUT	KEGIATAN	LOCUS
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK		
	Penanganan Pengaduan	Lokasi Kegiatan Penanganan Pengaduan meliputi 34 Provinsi, 415 Kabupaten, 1 Kabupaten Administrasi, 93 Kota Dan 5 Kota Administrasi Berdasarkan Pengaduan Yang Masuk Dan Ditangani.
	Pengawasan Perizinan	Lokasi Kegiatan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan meliputi 34 Provinsi Dengan Target 500 Perusahaan
	Lokasi Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi Terkait DAS Citarum;	Provinsi Jawa Barat Dengan Target 90 Perusahaan
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG DI SELESAIKAN		
	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi rawan kebakaran (Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara) • Provinsi padat industri (Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) • Provinsi Tabrakan Kapal di Laut (Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur)
LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN		
		Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua
KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21		
		Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Tabel 50. Matriks Rekapitulasi Locus Per Output Per Kegiatan

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN

OUTPUT	PROVINSI	LOCUS
LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN		
SUMATERA UTARA		TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER, TAHURA BUKIT BARISAN, SM KARANG GADING TIMUR LAUT, TWA HOLIDAY RESORT
RIAU		TN TESSON NILO, HPT EKOSISTEM TESSO NILO, SM GIAM SIAK KECIL, SM BUKIT BATU, HPT MINAS, TWA DJUMAL, SM BALAI RAJA, HL MAHATO;
KEP RIAU		TB PULAU REMPANG
SUMSEL		KPHP LALAN, SM DANGKUL, TN SEBANGAU
BABEL		HK GUNUNG MANGKOL, TAHURA GUNUNG MANUMBING
KALBAR		CA MANDOR, HP KAB KETAPANG, TN DANAU SENTARUM, TWA GUNUNG MELINTANG, TN BUKIT BAKA BUKIT RAYA
KALTENG		TN TANJUNG PUTTING, KPHK KAPUAS, TN SEBANGAU, SM LAMANDAU
KALTIM		TN KUTAI, KHDTK LABANAN, TAHURA BUKIT SOEHARTO
BANTEN		TN UJUNG KULON
JABAR		BOPUNJUR, KPH BOGOR, TN GUNUNG HALIMUN SALAK, TN GUNUNG GEDE PANGRANGO, KPH PURWAKARTA
JATIM		TN MERU BETRI, TN BROMO TENGGER SEMERU, KPH PERUM PERHUTANI
BALI		TAHURA NGURAH RAI
NTT		KPHP SUMBA, TWA RUTENG, SMA KATERI, CA WAE WUJ, TWA 17 PULAU, CA MUTIS, TWA PULAU LAPANG, CA WOLOTADO, TWA TUTI ADAGAE
NTB		TB PULAU MOYO, TN GUNUNG RINJANI, KPH WOWORADA, TWA BANGKO BANGKO, TWA TANJUNG TAMPA, TWA PELANGAN, KPHP LADANG TENGAH;
SULTRA		HP KONAWE, HP KOLAKA, TN RAWA AOPA, SM BUTON UTARA
SULBAR		MAMUJU
SULSEL		TWA MALINO
SULTENG		TAHURA PODOYA
SULUT		BOLAANG MONGONDOW, TN BOGANI NANI WARTABONE
GORONTALO		CA TANJUNG PANJANG, HP POKHUWATO
MALUKU		PULAU B LIRU, MALUKU UTARA, HALMAHERA UTARA, HALMAHERA SELATAN
PAPUA BARAT		RAJA AMPAT, SORONG

Tabel 54. Matriks Locus Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan

RINCIAN USUSULAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN
TA 2020

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
029.10.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0		41.400.343.000
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0		1.468.080.000
5427.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line]	1	Layanan	
5427.994.004	Layanan Perkantoran Direktorat PPH	0		1.468.080.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0		1.468.080.000
A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	0		208.290.000
B	Langganan Daya dan Jasa	0		208.000.000
C	Pemeliharaan Kantor	0		565.890.000
D	Biaya Operasional Pimpinan	0		438.300.000
F	Penataan Arsip Direktorat PPH	0		47.600.000
5427.999	Output Cadangan [Base Line]	1	Cadangan	5.000.000
999	Komponen Cadangan	0		5.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0		5.000.000
	- Output Cadangan	1	KEG	5.000.000
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0		39.927.263.000
5428.001	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan [Base Line]	1276000	Hektar	29.263.307.000
5428.001.001	Kawasan Hutan yang diamankan	0		26.763.307.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan dan Hasil hutan	0		9.948.200.000
A	Pengumpulan Data dan Informasi Gangguan dan Ancaman Tipihut	0		5.057.550.000
B	Operasional Satgas Patroli Siber Perdagangan TSL Online	0		99.660.000
C	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Data dan Informasi	0		4.790.990.000
052	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	0		6.820.107.000

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
A	Operasi Pemulihan Kawasan Hutan	0		4.885.107.000
B	Mobilisasi Tenaga Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0		1.185.000.000
C	Pembinaan dan Supervisi Pencegahan dan Pengamanan Hutan ke UPT dan Instansi Terkait	0		750.000.000
053	Operasi Penyelamatan SDA	0		9.995.000.000
A	Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan	0		9.995.000.000
5428.001.002	Kawasan Hutan di DAS Citarum yang diamankan	0		2.500.000.000
051	Operasi Pengaman Kawasan Hutan di DAS Citarum	0		2.000.000.000
A	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan di DAS Citarum	0		2.000.000.000
052	Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	0		500.000.000
A	Sosialisasi Pengamanan DAS Citarum	0		500.000.000
5428.002	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal [Base Line]	18	Operasi	10.642.756.000
5428.002.001	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar	0		2.448.256.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	0		510.000.000
A	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	0		510.000.000
052	Operasi Pembalakan Liar	0		1.088.256.000
A	Operasi Pembalakan Liar	0		1.088.256.000
053	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	0		850.000.000
A	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	0		850.000.000
5428.002.002	Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0		8.194.500.000
051	Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	0		247.000.000
A	Penyusunan Bahan Penyiapan NSPK	0		247.000.000
052	Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	0		330.000.000
A	Sosialisasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0		145.950.000
B	Tindak Lanjut Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0		184.050.000
053	Peningkatan Kapasitas Polhut	0		600.000.000
A	Latihan Menembak	0		118.350.000
B	Penilaian Polhut dalam rangka Penilaian Wana Lestari	0		282.900.000

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah
C	Penyegaran POLHUT/SPORC	0		159.450.000
D	Peningkatan Kesemaptaan Polhut dan SPORC	0		39.300.000
054	Penguatan Sistem Intelijen	0		1.797.500.000
A	Penguatan Sistem Intelijen	0		333.150.000
C	Pengelolaan "Operational Room" Data Manajemen System Penegakan Hukum	0		857.270.000
D	Sinkronisasi dan Koordinasi Operator Opsroom	0		48.820.000
E	Pelaporan dan Analisa Data PHLHK	0		147.900.000
F	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Operasional Room	0		410.360.000
055	Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	0		5.220.000.000
A	Pengadaan Peralatan dan Mesin	0		304.800.000
B	Pengadaan Seragam Lapangan Dit. PPH	0		60.975.000
D	Fasilitasi Penertiban dan Pengurusan Senjata Api Lingkup Dit. PPH	0		337.365.000
E	Pengadaan Senjata Api Polhut	0		2.447.140.000
F	Penggandaan Amunisi	0		27.860.000